Katalog BPS: 9302020.3672

PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KOTA CILEGON

MENURUT PENGELUARAN

2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CILEGON

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KOTA CILEGON

MENURUT PENGELUARAN

2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA CILEGON MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISSN : 2598-862X
Nomor Publikasi : 36720.2004
Katalog BPS : 9302020.3672
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 111

Naskah :
BPS Kota Cilegon

Penyunting :
BPS Kota Cilegon

Desain Kover :
BPS Kota Cilegon

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Kota Cilegon

Dicetak oleh :
-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://cilegonkota.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA CILEGON MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

Tim Penyusun:

Penanggungjawab Umum:
Bambang Suyatno, SH, MM

Penyunting:
Suhandi, S.St, MM

Penulis:
Suhandi, S.St, MM

Pengolah Data:
Suhandi, S.St, MM

https://cilegonkota.bps.go.id

https://cilegonkota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran, disusun sebagai salah satu perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ataupun sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi di dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pada publikasi tahun ini, merupakan kelanjutan tahun sebelumnya yaitu telah menggunakan tahun dasar 2010 serta menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta yang telah berkontribusi dalam mewujudkan publikasi ini. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, kami membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan selanjutnya.

Semoga bermanfaat.

Cilegon, Mei 2020

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon

Kepala,

Bambang Suyatno

https://cilegonkota.bps.go.id

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB 5

BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 9
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga 11
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT 18
2.3. Konsumsi Konsumsi Akhir Pemerintah 24
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)..... 29
2.5. Perubahan Inventori 39
2.6. Ekspor dan Impor Barang serta Jasa 47

BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA CILEGON TAHUN 2015 – 2019 51
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kota Cilegon Menurut Pengeluaran 54
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 60
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT 63
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah 64

https://cilegonkota.bps.go.id

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) 67
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori 69
3.7. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa 72
3.8. Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan Jasa 74

BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB 77
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (Nominal) 79
4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor 81
4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB 82
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB..... 83
4.5. Perbandingan Ekspor Luar Negeri Terhadap PMTB 85
4.6. Perbandingan PDRB Terhadap Total Impor 86
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan 87
4.8. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) 88
4.9. *Incremental Capital Output Ratio* (*ICOR*) 90

BAB V. PENUTUP..... 93

LAMPIRAN..... 97

DAFTAR PUSTAKA 109

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 ……. 54

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2014 – 2018…..... 55

Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019…….…..... 58

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019……..... 59

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019…….…..... 60

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Cilegon, 2015-2019……..... 61

Tabel 3.7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Kota Cilegon, 2015-2019…..... 63

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Cilegon, 2015-2019 ……..... 65

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB, Kota Cilegon, 2015–2019 68

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kota Cilegon, 2015-2019 71

Tabel 3.11. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa, Kota Cilegon, 2015-2019 ……..... 73

https://cilegonkota.bps.go.id

Tabel 3.12. Perkembangan Impor Barang dan Jasa, Kota Cilegon, 2015-2019 75
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kota Cilegon, 2015-2019 80
Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor, Kota Cilegon, 2015-2019 81
Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, Kota Cilegon, 2015-2019 83
Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kota Cilegon, 2015- 2019 84
Tabel 4.5. Rasio Ekspor Luar Negeri terhadap PMTB (ADHB), Kota Cilegon, 2015-2019 85
Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor, Kota Cilegon, 2015-2019 86
Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan, Kota Cilegon, 2015-2019 87
Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Cilegon, 2015-2019 90
Tabel 4.9. Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kota Cilegon, 2015-2019 92

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 ….. 57

Grafik 3.2. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010, Kota Cilegon, 2015 – 2019 …… 72

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 …….. 99

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 ……. 100

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 ……. 101

Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 …… 102

Lampiran 5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 …… 103

Lampiran 6. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 …… 104

Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 ……..…… 105

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019….. 106

Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015- 2019 ……. 107

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

https://cilegonkota.bps.go.id

1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi serta perubahannya. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang telah mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

https://cilegonkotabps.go.id

a. **Menurut Pendekatan Produksi**,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa sub-sub kategori lapangan usaha.

https://cilegonkota.bps.go.id

b. **Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya termasuk pajak tak langsung neto.

https://cilegonkotaapps.go.id

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB

yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri.

https://cilegonkota.bps.go.id

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://cilegonkota.bps.go.id

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://cilegonkota.bps.go.id

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

https://cilegonkotabps.go.id

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara

bersama-sama, utamanya adalah kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan

https://cilegonkota.bps.go.id

8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali manjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

https://cilegonkota.bps.go.id

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (o*wner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

https://cilegonkota.bps.go.id

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

https://cilegonkota.bps.go.id

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment)*. Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan

https://cilegonkota.bps.go.id

pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara metode deflasi yaitu mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
   a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
   b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun;

https://cilegonkota.bps.go.id

2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

https://cilegonkota.bps.go.id

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti

secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non-profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang

https://cilegonkota.bps.go.id

diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *non-profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan kegiatan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://cilegonkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

https://cilegonkota.bps.go.id

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).

  Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

  Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

https://cilegonkota.bps.go.id

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-

cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \ldots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \ldots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010,

https://cilegonkota.bps.go.id

diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu daerah/negara. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah

https://cilegonkota.bps.go.id

akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank di masing-masing provinsi, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

https://cilegonkota.bps.go.id

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

https://cilegonkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit

pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

https://cilegonkota.bps.go.id

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
d. Output Bank Indonesia masing-masing provinsi (BI)

e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

PK-P adh Berlaku =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

https://cilegonkota.bps.go.id

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (*at cost*), yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan

kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

https://cilegonkota.bps.go.id

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah/negara. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB/PDB,

aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang

https://cilegonkota.bps.go.id

disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

https://cilegonkota.bps.go.id

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

   a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.

   b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

   c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).

   d. Laporan keuangan perusahaan.

https://cilegonkota.bps.go.id

e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.

f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).

h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

i. Publikasi Statistik Konstruksi.

j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan

https://cilegonkota.bps.go.id

produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh

https://cilegonkota.bps.go.id

berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan digunakan cara deflasi yaitu PMTB adh Berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang

https://cilegonkota.bps.go.id

modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan cara deflasi yaitu men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

https://cilegonkota.bps.go.id

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua,* untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara deflasi yaitu men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Kementrian ESDM dan Badan Pengelola (BP) Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

https://cilegonkota.bps.go.id

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan cara deflasi yaitu men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and*

https://cilegonkota.bps.go.id

Transport Margin) sulit diperoleh.

c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori

https://cilegonkotabps.go.id

menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau

https://cilegonkota.bps.go.id

bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

https://cilegonkota.bps.go.id

b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

f. Ternak untuk tujuan dipotong;

g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir,

https://cilegonkota.bps.go.id

dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Banten (ASI),

https://cilegonkota.bps.go.id

gula dari Dewan Gula Banten (DGI), dan ternak dari Ditjen Peternakan Kementrian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

https://cilegonkota.bps.go.id

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku,

diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian

https://cilegonkota.bps.go.id

tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi pada data-data industri

https://cilegonkota.bps.go.id

yang informasinya tidak tersedia;

2.6. *EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA*

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan wilayah lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

https://cilegonkota.bps.go.id

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
c. Net Ekspor antar daerah
   - Ekspor antar daerah
   - Impor antar daerah

https://cilegonkota.bps.go.id

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$)
b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$)
c. Neraca Pembayaran masing-masing provinsi dari BI
d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Banten

https://cilegonkota.bps.go.id

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang, sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran masing-masing provinsi (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaski yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sementara untuk net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA CILEGON

https://cilegonkota.bps.go.id

Perubahan struktur ekonomi Kota Cilegon akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukan bahwa setiap komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pendekatan pengeluaran, mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah Kota Cilegon digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, Lembaga Non Profit (LNPRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori). Berikut diuraikan perilaku dari masing-masing komponen pengeluaran tersebut.

https://cilegonkota.bps.go.id

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA CILEGON MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Cilegon mulai menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015 - 2019 (Miliar Rupiah)

https://cilegonkota.bps.go.id

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga	14.609,25	15.643,02	16.811,79	19.210,55	21.066,04
2. Konsumsi LNPRT	42,02	45,73	50,68	54,66	59,90
3. Konsumsi Pemerintah	1.001,37	1.110,11	1.206,96	1.465,65	1.659,66
4. PMTB	33.226,87	36.592,98	37.420,05	39.880,25	44.976,17
5. Perubahan Inventori	18,46	15,68	20,25	33,66	28,16
6. Ekspor	180.631,30	189.051,38	211.313,35	214.555,71	213.740,11
7. Impor	152.471,34	160.505,32	177.951,59	178.405,50	177.281,22
Total PDRB ADHB	77.057,93	81.953,57	88.871,49	96.794,98	104.248,82

Berdasarkan Tabel 3.1, nilai PDRB Kota Cilegon ADHB selama periode tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 77.057,93 milyar rupiah menjadi 104.248,82 milyar rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah tangga	12.120,18	12.703,54	13.288,66	13.928,03	14.646,12
2. Konsumsi LNPRT	35,20	36,75	38,71	40,64	43,66
3. Konsumsi Pemerintah	720,04	752,88	798,21	870,79	970,17
4. PMTB	25.139,14	26.084,97	26.081,44	27.264,92	29.092,91
5. Perubahan Inventori	75,01	46,05	45,36	49,16	34,69
6. Ekspor	154.963,52	157.113,25	179.132,54	185.681,18	183.514,52
7. Impor	133.070,35	133.756,41	152.940,39	157.425,32	153.916,84
Total PDRB ADHK	59.982,73	62.981,05	66.444,53	70.409,39	74.385,22

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil., utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015-2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Cilegon berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 59.982,73 milyar tahun 2015 menjadi 74.385,22 milyar pada tahun 2019.

Dari Grafik 3.1, nampak bahwa pada umunya nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selalu lebih besar dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena PDRB ADHB dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dalam penghitungannya. Sedangkan dalam penghitungan PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga tersebut telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E), dimana ekspor neto adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor (X-I).

https://cilegonkota.bps.go.id

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015 – 2019 (Miliar rupiah)

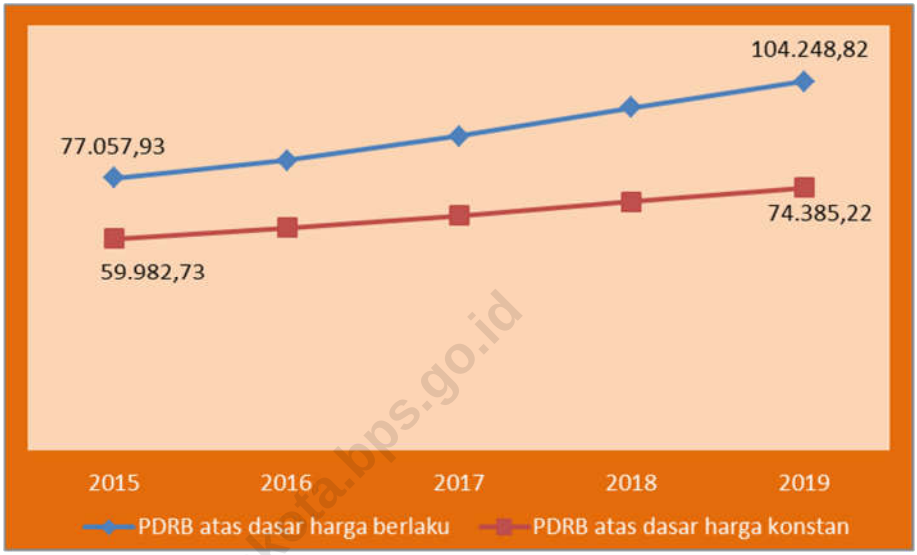

https://cilegonkota.bps.go.id

Berdasarkan tabel 3.3 berikut, selama periode 2015 s.d 2019, rata-rata produk yang dikonsumsi di wilayah Kota Cilegon sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan modal (43,14%). Ekspor ke luar Kota Cilegon juga mempunyai peran yang relatif besar, rata-rata sekitar 205,03 persen. Namun demikian, impor juga masih mempunyai peran yang relatif besar, karena rata-rata sekitar 170,06 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor dari luar Kota Cilegon. Kecenderungan ekspor dan impor Kota Cilegon dalam periode tersebut menunjukkan nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor (surplus).

Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir pemerintah relatif stagnan pada kisaran rata-rata sebesar 1,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015 – 2019 (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	18,96	19,09	18,92	19,85	20,21
2. Konsumsi LNPRT	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Konsumsi Pemerintah	1,30	1,35	1,36	1,51	1,59
4. PMTB	43,12	44,65	42,11	41,20	43,14
5. Perubahan Inventori	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
6. Ekspor Luar Negeri	234,41	230,68	237,77	221,66	205,03
7. Impor Luar Negeri	197,87	195,85	200,23	184,31	170,06
Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://cilegonkota.bps.go.id

Sementara konsumsi akhir rumah tangga rata-rata sekitar 20,21 persen dari produk yang dikonsumsi di wilayah Kota Cilegon. Sedangkan proporsi konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga berada pada rentang 0,06 persen.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dari tahun 2015 s.d 2019 mengalami fluktuasi, dengan masing-masing pertumbuhan 4,62 persen (2014), 4,75 persen (2015), 5,00 persen

(2016), dan 5,47 persen (2017), dan 5,83 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 5,83 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (4,62 persen).

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015 – 2019 (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,73	4,81	4,61	4,81	5,16
2. Konsumsi LNPRT	5,78	4,42	5,31	5,00	7,43
3. Konsumsi Pemerintah	4,83	4,56	6,02	9,09	11,41
4. PMTB	4,40	3,76	-0,01	4,54	6,70
5. Perubahan Inventori	-31,78	-38,60	-1,49	8,38	-29,44
6. Ekspor Luar Negeri	-0,30	1,39	14,01	3,66	-1,17
7. Impor Luar Negeri	-1,09	0,52	14,34	2,93	-2,23
Total PDRB	4,75	5,00	5,50	5,97	5,65

https://cilegonkota.bps.go.id

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan, kecuali pada komponen perubahan inventori yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam harga.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Cilegon, 2015 – 2019 (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,54	123,14	126,51	137,93	143,83
2. Konsumsi LNPRT	119,37	124,41	130,92	134,49	137,20
3. Konsumsi Pemerintah	139,07	147,45	151,21	168,31	171,07
4. PMTB	132,17	140,28	143,47	146,27	154,59
5. Perubahan Inventori	24,61	34,04	44,63	68,47	81,19
6. Ekspor Luar Negeri	116,56	120,33	117,96	115,55	116,47
7. Impor Luar Negeri	114,58	120,00	116,35	113,33	115,18
Total PDRB	128,47	130,12	133,75	137,47	140,15

https://cilegonkota.bps.go.id

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati posisi kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010) hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	14.609,25	15.643,02	16.811,79	19.210,55	21.066,04
b. ADHK 2010 (*Miliar Rp*)	12.120,18	12.703,54	13.288,66	13.928,03	14.646,12
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	18,96	19,09	18,92	19,85	20,21
Jumlah Penduduk (Jiwa)	412 106	418 705	425 103	431 305	437 205
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	35 450,22	37 360,48	39 547,57	44 540,52	48 183,44
b. ADHK 2010	29 410,35	30 340,07	31 259,86	32 292,76	33 499,43
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,73	4,81	4,61	4,81	5,16
b. Per-kapita (%)	3,98	3,16	3,03	3,50	3,74
c. Penduduk (%)	1,68	1,60	1,53	1,46	1,37

https://cilegonkota.bps.go.id

Presentase pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015-2019 terus mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 18,96 persen, kemudian pada tahun 2017 sebesar 18,92 persen dan pada tahun 2019 menjadi 20,21 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per-kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015, secara umum setiap orang di Kota Cilegon menghabiskan dana sekitar 35,45 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 37,36 juta rupiah (2016); 39,55 juta (2017); 44,54 juta (2018); dan menjadi 48,18 juta rupiah pada tahun 2019.

Sementara itu, pada perkiraan ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per-kapita tumbuh pada kisaran 3,74 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,98 persen. Rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2015 (ADHK 2010) sebesar 5,73 persen. Namun mulai 2016, pertumbuhan total konsumsi rumah tangga terus mengalami penurunan, menjadi sebesar 4,81 persen pada tahun 2016, kemudian sebesar 4,61 persen pada tahun 2017, lalu mulai naik lagi menjadi 4,81 persen pada tahun 2018 dan 5,16 pada tahun 2019. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan konsumsi perkapita yang rata-rata tumbuh sebesar 3,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, baik konsumsi untuk makanan maupun konsumsi non makanan.

https://cilegonkotabps.go.id

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPRT) peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.7 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kota Cilegon yang relatif sangat kecil.

Tabel 3.7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Cilegon, 2015-2019

U r a i a n	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	42,02	45,73	50,68	54,66	59,90
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	35,20	36,75	38,71	40,64	43,66
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Pertumbuhan	5,78	4,42	5,31	5,00	7,43

https://cilegonkotabps.go.id

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2015 – 2019 mengalami peningkatan. Namun proporsi terhadap PDRB Kota Cilegon relatif stagnan, rata-rata yaitu sebesar 0,05 persen.

Apabila dilihat dari pengeluaran riil, maka konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2015 sebesar 35,20 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,78 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan yang paling pesat di banding tahun lainnya selama periode 2015-2018. Mulai tahun 2016, konsumsi LNPRT mengalami perlambatan, dimana pertumbuhannya rata-rata hanya sekitar 5 persen. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat menjadi 7,43 persen. Jadi meskipun nilai konsumsi LNPRT semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya bisa dibilang relatif stagnan kecuali tahun 2019.

Kondisi kontribusi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kota Cilegon yang relatif tetap pada kisaran 0,05 persen menggambarkan aktifitas LNPRT dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat relatif sama, terjadwal atau musiman, dan telah menjadi agenda rutin dari tahun ke tahun, seperti perayaan hari besar keagamaan.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Cilegon serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010.

https://cilegonkota.bps.go.id

Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 910,90 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 1.355,34 miliar rupiah.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Cilegon, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1 001,37	1 110,11	1 206,96	1 465,65	1 659,66
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	720,04	752,88	798,21	870,79	970,17
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	1,30	1,35	1,36	1,51	1,59
Konsumsi Pemerintah per-kapita *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	2 429,88	2 651,30	3 091,56	3 142,41	3 142,41
b. ADHK 2010	1 747,22	1 798,12	1 877,69	2 018,97	2 219,03
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	4,83	4,56	6,02	9,09	11,41
b. Konsumsi per-kapita	3,10	2,91	4,43	7,52	9,91
Jumlah penduduk (*orang*)	412 106	418 705	425 103	431 305	437 205

https://cilegonkota.bps.go.id

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas

pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 11,41 persen.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB relatif stagnan, berada pada kisaran 1,5 persen. Selama periode 2015-2019 porsi konsumsi pemerintah tidak lebih dari 2 persen dari total PDRB Kota Cilegon.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 2,43 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 3.11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 3.11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Jika dibandingkan laju pertumbuhan antar tahunnya terlihat adanya kecenderungan pertumbuhan yang semakin tinggi sepanjang 2016-2019. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,41 persen.

https://cilegonkota.bps.go.id

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP *BRUTO (PMTB)*

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selama periode 2015-2019, nilai PMTB mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 3.12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami pertumbuhan . Pada tahun 2019, pertumbuhan PMTB merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir, yang mencapai 6,70 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen non bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan untuk sub komponen non bangunan cenderung fluktuatif

https://cilegonkota.bps.go.id

dan polanya relatif tidak stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya.

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Cilegon, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	33 226,87	36 592,98	37 420,05	39 880,25	44 976,17
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	25 139,14	26 084,97	26 081,44	27 264,92	29 092,91
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	43,12	44,65	42,11	41,20	43,14
Struktur PMTB					
a. Bangunan (*Miliar Rp*)	11 702,89	14 365,52	14 428,05	14 491,61	16 482,78
(%)	*(35,22)*	*(39,26)*	*(38,56)*	*(36,34)*	*(36,652)*
b. Non Bangunan (*Miliar Rp*)	21 523,98	22 227,46	22 992,00	25 388,63	28 493,39
(%)	*(64,78)*	*(60,74)*	*(61,44)*	*(63,66)*	*(63,35)*
Pertumbuhan[1] (%)					
a. Bangunan	6,30	11,16	(5,17)	0,18	3,84
b. Non Banguan	3,29	(0,67)	3,45	7,22	8,35
Total PMTB	4,40	3,76	(0,01)	4,54	6,70

https://cilegonkota.bps.go.id

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif mengalami fluktuasi selama periode 2015 – 2019 (tabel 3.12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pada tahun 2015 sub komponen non bangunan naik sebesar 3,29 persen, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 0,67 persen. Pada tahun 2017

[1] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

sub komponen ini naik lagi menjadi 3,45 persen, tahun 2018 dan 2019 masing-masing mengalami pertumbuhan positif yaitu 7,22 dan 8,35 persen.

Berbeda dengan sub komponen non bangunan, pertumbuhan sub komponen bangunan pada tahun 2015 sebesar 6,30 persen kemudian mengalami percepatan menjadi 11,16 persen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan 5,17 persen. Pada tahun 2017 PMTB sub komponen bangunan kembali mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2015-2019 pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 6,70 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar -0,01 persen.

https://cilegonkota.bps.go.id

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak dapat berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

https://cilegonkotaapps.go.id

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	18,46	15,68	20,25	33,66	28,16
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	75,01	46,05	45,36	49,16	34,69
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Pertumbuhan (%)	-31,78	-38,60	-1,49	8,38	-29,44

Pada tahun 2015 perubahan inventori sebesar 18,46 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 0,02 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Cilegon. Sedangkan pada tahun 2019 proporsinya mengalami peningkatan menjadi 0,03 persen atau sebesar 28,16 miliar rupiah.

https://cilegonkota.bps.go.id

Grafik 3.2. Perbandingan Perubahan Inventori ADHB dan ADHK 2010, Kota Cilegon , 2015 -2019

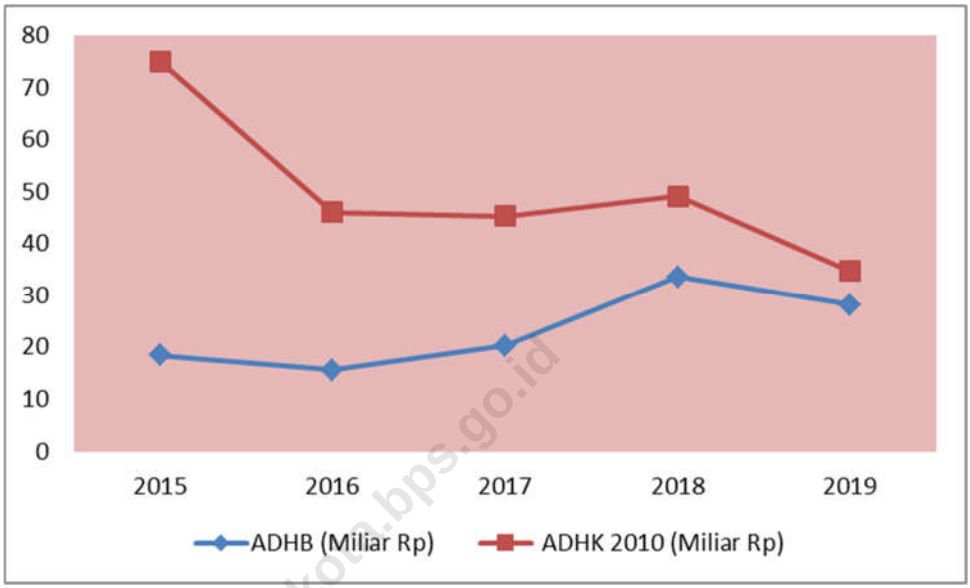

https://cilegonkota.bps.go.id

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.11. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	180 631,30	189 051,38	211 313,35	214 555,71	213 740,11
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	154 963,52	157 113,25	179 132,54	185 681,18	183 514,52
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	234,41	230,68	237,77	221,66	205,03
Pertumbuhan[2] (%)	(0,30)	1,39	14,01	3,66	(1,17)

Secara total, nilai ekspor Kota Cilegon selama periode tahun 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 nilai ekspor Kota Cilegon mencapai 180.631,3 miliar rupiah; 189.051,38 miliar rupiah (2016); 211.313,35 miliar rupiah (2017); 214.555,71 miliar rupiah (2018); dan 213.740,11 miliar rupiah di tahun 2019. Sejalan dengan nilai ekspor ADHB, nilai ekspor ADHK 2010 juga menunjukan kecenderungan meningkat dengan nilai "riil" sebesar 154.963,52 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi sebesar 183.514,52 miliar rupiah pada tahun 2019. Selama kurun waktu 2015-2019, meskipun secara nominal nilai ekspor luar negeri mengalami peningkatan, tetapi rata-rata proporsinya terhadap PDRB Kota Cilegon relatif turun, yaitu dari 234,41 persen pada tahun 2015 menjadi 05,03 persen di tahun 2019.

Pertumbuhan rill total ekspor pada tahun 2019 turun menjadi -0,30 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu

[2] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)*

https://cilegon.kota.bps.go.id

sebesar 14,01 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa.

Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2015. Perlambatan tersebut disebabkan oleh adanya gejolak harga beberapa komoditas ekspor di pasar internasional yang menurun tajam terutama produk industri pengolahan yang merupakan komoditas utama/unggulan Kota Cilegon.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR LUAR NEGERI BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Cilegon. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor luar negeri, transaksi impor luar negeri menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor luar negeri terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

https://cilegonkota.bps.go.id

Tabel 3.12. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor LN					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	152 471,34	160 505,32	177 951,59	178 405,50	177 281,22
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	133 070,35	133 756,41	152 940,39	157 425,32	153 916,84
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	197,87	195,85	200,23	184,31	170,06
Pertumbuhan[3] (%)	(1,09)	0,52	14,34	2,93	(2,23)

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor (luar daerah dan luar negeri) menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Cilegon terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor luar negeri termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Cilegon di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.15 di atas menunjukan bahwa pola perkembangan impor Kota Cilegon periode tahun 2015-2018 cenderung meningkat (baik ADHB maupun ADHK 2010) dan menurun pada tahun 2019. Nilai impor Kota Cilegon pada tahun 2015 sebesar 152.471,34 miliar rupiah naik hingga mencapai nilai 178.405,50 miliar rupiah pada tahun 2018 lalu turun menjadi 177.281,22 miliar rupiah pada tahun 2019. Dari sisi lain, proporsi impor terhadap PDRB Kota Cilegon juga memiliki

[3] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)*

https://cilegonkota.bps.go.id

kecenderungan berkurang dengan porsi terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 197,87 persen, sedangkan porsi terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 170,06 persen.

Sama halnya dengan proporsi impor terhadap PDRB, secara riil pertumbuhan impor Kota Cilegon juga cenderung mengalami penurunan dari 14,34 persen di tahun 2017 menjadi -2,23 persen di tahun 2019. Meskipun di tahun 2017 mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu mencapai 14,34 persen, namun di tahun 2018 kembali mengalami perlambatan yang cukup drastis hingga hanya sebesar 2,93 persen. Kemudian pada tahun 2019 kembali turun menjadi -2,23 persen.

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA CILEGON

https://cilegonkota.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB perkapita Kota Cilegon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 4.1), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Cilegon rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

https://cilegonkota.bps.go.id

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Miliar Rp)*					
- ADHB	77 057,93	81 953,57	88 871,49	96 794,98	104 248,82
- ADHK 2010	59 982,73	62 981,05	66 444,53	70 409,39	74 385,22
PDRB perkapita *(juta Rp)*					
- ADHB	186,99	195,73	209,06	224,42	238,44
- ADHK 2010	145,55	150,42	156,30	163,25	170,14
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010		3,34	3,91	4,44	4,22
Jumlah penduduk	412.106	418.705	425.103	431.305	437.205
Pertumbuhan	1,68	1,60	1,53	1,46	1,37

https://cilegonkota.bps.go.id

Pertumbuhan per-kapita secara riil cenderung meningkat selama periode 2015-2019, dari sebesar 3,34 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 4,22 persen pada tahun 2019. Di lain pihak, pertumbuhan jumlah penduduk makin menurun dan tahun 2019 pada kisaran 1,37 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja menunjukan pertumbuhan secara riil tetapi juga menunjukan kualitas ekonomi Kota Cilegon.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang cukup dominan dalam pengeluaran PDRB Kota Cilegon (sekitar 20 persen), yang artinya bahwa sekitar seperlima produk yang dihasilkan di wilayah Kota Cilegon digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	14.609,25	15.643,02	16.811,79	19.210,55	21.066,04
Total Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	180.631,30	189.051,38	211.313,35	214.555,71	213.740,11
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10

https://cilegonkota.bps.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 hingga tahun 2018 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga kurang dari 0,1 kali dari yang diekspor dan baru pada tahun 2019 mencapai 0,1 kali ekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor yang terjadi pada beberapa tahun lebih cenderung stagnan, hal ini disebabkan karena nilai konsumsi

rumah tangga semakin bertambah seiring dengan bertambahnya nilai ekspor.

Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang terjadi juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga seiring dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Cilegon digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB relatif stabil berada pada kisaran 0,43-0,45. Pada tahun 2014 sebesar 0,45 persen kemudian turun menjadi 0,44 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kembali turun menjadi 0,43 persen dan pada tahun 2016 naik menjadi 0,45 persen. Kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 0,44 persen. Relatif stabilnya rasio konsumsi akhir rumah

https://cilegonkota.bps.go.id

tangga terhadap PMTB disebabkan karena peningkatan nilai investasi diiringi dengan percepatan konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	14.609,25	15.643,02	16.811,79	19.210,55	21.066,04
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	33.226,87	36.592,98	37.420,05	39.880,25	44.976,17
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0,44	0,43	0,45	0,48	0,47

https://cilegonkota.bps.go.id

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Cilegon, Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	14 609,25	15 643,02	16 811,79	18 224,87	18 224,87
b. LNPRT	42,02	45,73	50,68	54,77	54,77
c. Pemerintah	1 001,37	1 110,11	1 206,96	1 465,65	1 659,66
Jumlah	15 652,64	16 798,86	18 069,43	20 730,86	22 785,60
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	77.057,93	81.953,57	88.871,49	96.794,98	104.248,82
Proporsi (%)	20,31	20,50	20,33	21,42	21,86

https://cilegonkota.bps.go.id

Sebagian dari barang dan jasa yang dipasarkan di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (sekitar 20 persen). Nilai konsumsi akhir semakin meningkat setiap tahunnya, begitu pula proporsinya terhadap PDRB juga cenderung mengalami peningkatan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) semakin lama memiliki peran yang semakin meningkat.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR LUAR NEGERI TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5. Rasio Ekspor Luar Negeri terhadap PMTB (ADHB) Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Luar Negeri (ADHB) *(Miliar Rp)*	180.631,30	189.051,38	211.313,35	214.555,71	213.740,11
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	33.226,87	36.592,98	37.420,05	39.880,25	44.976,17
Rasio Ekspor LN terhadap PMTB	5,44	5,17	5,65	5,38	4,75

https://cilegonkota.bps.go.id

Selama tahun 2015-2019 ekspor Kota Cilegon mempunyai nilai yang jauh lebih besar dari PMTB (sekitar 5 s.d 6 kali lipat).

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP TOTAL IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti menunjukkan ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor, Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	77.057,93	81.953,57	88.871,49	96.794,98	104.248,82
Total Impor (ADHB) *(Miliar Rp)*	152.471,34	160.505,32	177.951,59	178.405,50	177.281,22
Rasio PDRB terhadap Impor	0,51	0,51	0,50	0,54	0,59

https://cilegonkota.bps.go.id

Rasio PDRB terhadap impor dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan nilai yang mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata sebesar 0,53. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,50 dan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,59. Peningkatan rasio disebabkan oleh peningkatan PDRB yang relatif

lebih besar dibandingkan dengan peningkatan nilai impor. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL *PERMINTAAN*

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Cilegon, 2015- 2019 (Miliar Rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)	77 057,93	81 953,57	88 871,49	96 794,98	104 248,82
(%)	*(33,57)*	*(33,80)*	*(33,41)*	*(35,59)*	*(35,59)*
Total Impor ADHB	152 471,34	160 505,32	177 951,59	178 405,50	177 281,22
(%)	*(66,43)*	*(66,20)*	*(66,59)*	*(64,41)*	*(64,41)*
Total Permintaan Akhir[1]	229 529,27	242 458,89	266 823,08	275200,48	281 530,04
(%)	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*

[1] *Termasuk diskrepansi statistik*

https://cilegonkota.bps.go.id

Dari tabel 4.7 diatas, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar (baik luar daerah maupun luar negeri), dengan persentase sekitar 66-70 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 30 - 34 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 229.529,27 miliar rupiah (2015) menjadi sebesar 281.530,04 miliar rupiah (2019).

Di sisi lain, "penyediaan" produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 77.057,93 miliar rupiah (2015); 81.953,57 miliar rupiah (2016); 88.871,49 miliar rupiah (2017); dan 96.794,98 miliar rupiah (2018); dan 104.248,82 miliar rupiah (2019). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 152.471,34 miliar rupiah (2015); 160.505,32 miliar rupiah (2016); 177.951,59 miliar rupiah (2017); 178.405,50 miliar rupiah (2018); dan 177.281,22 milair rupiah pada tahun 2019.

https://cilegonkotakab.go.id

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto"**, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah

defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai total ekspor terhadap total impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2015 - 2019, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Cilegon dengan luar negeri dan antar daerah, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan barang dan jasa Kota Cilegon selalu dalam posisi surplus. Nilai total ekspor yang lebih besar dari total impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk.

https://cilegonkota.bps.go.id

Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Cilegon, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	180.631,30	189.051,38	211.313,35	214.555,71	213.740,11
Total Impor (ADHB) *(Miliar Rp)*	152.471,34	160.505,32	177.951,59	178.405,50	177.281,22
Net ekspor (X – M) *(Miliar Rp)*	28.159,96	28.546,06	33.361,76	36.150,21	36.458,89
Rasio ekspor thd Impor	1,18	1,18	1,19	1,20	1,21

Sementara rasio total ekspor terhadap total impor cenderung stabil dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 1,18 menjadi sekitar 1,21 pada tahun 2019.

https://cilegonkota.bps.go.id

4.9. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

https://cilegonkota.bps.go.id

Tabel 4.9. Incremental Capital Output Ratio Kota Cilegon, 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) *(Miliar Rp)*	59.982,73	62.981,05	66.444,53	70.409,39	74.385,22
Perubahan *(Miliar Rp)*	2.720,81	2.998,32	3.463,48	3.964,86	3.975,83
PMTB (ADHK 2010) *(Miliar Rp)*	25.139,14	26.084,97	26.081,44	27.264,92	29.092,91
ICOR	9,24	8,70	7,53	6,88	7,32

Data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR Kota Cilegon cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 9,24 pada tahun 2015 menjadi 7,32 pada tahun 2019. Dari besaran ICOR pada tahun 2019 sebesar 7,32 tersebut dapat dikatakan bahwa di Kota Cilegon untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan penambahan kapital sebesar 7,32 miliar rupiah.

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

BAB V

PENUTUP

https://cilegonkota.bps.go.id

KESIMPULAN

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015-2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Cilegon pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing

https://cilegonkota.bps.go.id

parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Cilegon terhadap ekonomi negara dan wilayah lain *(rest of the world*).

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

LAMPIRAN

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	14.609.252,17	15.643.018,88	16.811.788,60	19.210.551,01	21.066.036,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	42.018,39	45.726,05	50.675,24	54.660,85	59.902,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.001.366,93	1.110.114,49	1.206.960,77	1.465.654,63	1.659.661,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	33.226.871,41	36.592.981,40	37.420.054,97	39.880.245,17	44.976.171,51
5. Perubahan Inventori	18.459,24	15.676,01	20.245,07	33.658,90	28.161,20
6. Ekspor	180.631.303,55	189.051.376,85	211.313.354,71	214.555.711,95	213.740.106,07
7. Impor	152.471.341,33	160.505.319,67	177.951.590,53	178.405.498,50	177.281.218,71
PDRB	77.057.930,37	81.953.574,00	88.871.488,82	96.794.984,01	104.248.820,50

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	12.120.176,06	12.703.542,91	13.288.661,51	13.928.030,02	14.646.117,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	35.200,02	36.754,98	38.706,67	40.642,00	43.661,70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	720.035,52	752.883,75	798.212,83	870.788,60	970.168,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	25.139.140,50	26.084.970,85	26.081.436,42	27.264.918,95	29.092.907,85
5. Perubahan Inventori	75.006,97	46.050,57	45.362,34	49.161,94	34.687,24
6. Ekspor	154.963.523,02	157.113.252,49	179.132.538,45	185.681.176,09	183.514.517,21
7. Impor	133.070.350,36	133.756.408,14	152.940.388,82	157.425.322,70	153.916.836,36
PDRB	59.982.731,73	62.981.047,41	66.444.529,41	70.409.394,91	74.385.223,49

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	18,96	19,09	18,92	19,85	20,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,30	1,35	1,36	1,51	1,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	43,12	44,65	42,11	41,20	43,14
5. Perubahan Inventori	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
6. Ekspor	234,41	230,68	237,77	221,66	205,03
7. Impor	197,87	195,85	200,23	184,31	170,06
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	20,21	20,17	20,00	19,78	19,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,20	1,20	1,20	1,24	1,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	41,91	41,42	39,25	38,72	39,11
5. Perubahan Inventori	0,13	0,07	0,07	0,07	0,05
6. Ekspor	258,35	249,46	269,60	263,72	246,71
7. Impor	221,85	212,38	230,18	223,59	206,92
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,02	7,08	7,47	14,27	9,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,14	8,82	10,82	7,87	9,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,93	10,86	8,72	21,43	13,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	11,68	10,13	2,26	6,57	12,78
5. Perubahan Inventori	-36,70	-15,08	29,15	66,26	-16,33
6. Ekspor	-3,82	4,66	11,78	1,53	-0,38
7. Impor	-5,99	5,27	10,87	0,26	-0,63
PDRB	10,48	6,35	8,44	8,92	7,70

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 6. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019 (Persen)

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,73	4,81	4,61	4,81	5,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,78	4,42	5,31	5,00	7,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,83	4,56	6,02	9,09	11,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,40	3,76	-0,01	4,54	6,70
5. Perubahan Inventori	-31,78	-38,60	-1,49	8,38	-29,44
6. Ekspor	-0,30	1,39	14,01	3,66	-1,17
7. Impor	-1,09	0,52	14,34	2,93	-2,23
PDRB	4,75	5,00	5,50	5,97	5,65

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran , Kota Cilegon, 2015-2019

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	120,54	123,14	126,51	137,93	143,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	119,37	124,41	130,92	134,49	137,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	139,07	147,45	151,21	168,31	171,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	132,17	140,28	143,47	146,27	154,59
5. Perubahan Inventori	24,61	34,04	44,63	68,47	81,19
6. Ekspor	116,56	120,33	117,96	115,55	116,47
7. Impor	114,58	120,00	116,35	113,33	115,18
PDRB	128,47	130,12	133,75	137,47	140,15

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,11	2,16	2,74	9,02	4,28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,07	4,22	5,24	2,73	2,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,87	6,02	2,55	11,31	1,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6,97	6,14	2,27	1,95	5,69
5. Perubahan Inventori	-7,22	38,32	31,11	53,41	18,58
6. Ekspor	-3,53	3,23	-1,96	-2,05	0,80
7. Impor	-4,95	4,73	-3,04	-2,60	1,63
PDRB	5,47	1,29	2,79	2,78	1,94

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Cilegon, 2015-2019

Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	1,15	0,97	0,93	0,96	1,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,06	0,05	0,07	0,11	0,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,85	1,58	-0,01	1,78	2,60
5. Perubahan Inventori	-0,06	-0,05	-0,00	0,01	-0,02
6. Ekspor	-0,82	3,58	34,96	9,86	-3,08
7. Impor	-2,57	1,14	30,46	6,75	-4,98
PDRB	4,75	5,00	5,50	5,97	5,65

*** Angka Sementara**

**** Angka Sangat Sementara**

https://cilegonkota.bps.go.id

https://cilegonkota.bps.go.id

PDRB PENGELUARAN KOTA CILEGON 2015-2019

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://cilegonkota.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Menurut Pengeluaran 2015-2019*, Serang.
2. Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Cilegon Menurut Pengeluaran 2014-2018*, Cilegon.

https://cilegonkota.bps.go.id

https://cilegonkota.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://cilegonkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CILEGON
Jl. Sukabumi Kavling Blok I, Cilegon 42418
Telp. 0254385524, Fax. 0254 385040
Email: bps3672@bps.go.id WebSite: cilegonkota.bps.go.id

ISSN 2598-862X